

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki potensi alam, keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang semuanya itu merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan secara umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Indonesia merupakan negara berkembang, tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah perwujudan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Dapat berupaya melakukan penyesuaian terhadap kemajuan dan perkembangan dunia yang mengarah kepada arus globalisasi yang semakin canggih, sebagai pemerintah terutama mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan disegala aspek.

Negara Republik Indonesia yang sangat luas, dengan banyaknya pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar diseluruh penjuru tanah air yang terpisahkan oleh lautan luas, begitu pula dengan keanekaragaman budaya penduduknya serta keindahan alamnya merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan pariwisata, dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah yakni Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah berhak dan diwajibkan untuk mengembangkan dan mengelola potensi daerahnya masing-masing.

Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dianggap paling penting sebagai langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, karena pendapatan negara tidak mungkin selamanya dari sektor migas, hal ini dikarenakan migas lama kelamaan akan habis akibat pemakaian yang terus menerus, akan tetapi sektor non migas seperti pariwisata juga dapat membantunya. Kesadaran akan pentingnya sektor kepariwisataan sebagai salah satu pemasukan bagi pemerintah dari sektor non migas sebenarnya bukan hal baru. Jauh sebelum krisis minyak dipasar Internasional pada tahun 1980-an Pemerintah Indonesia telah melihat potensi kurang lebih 17.000 pulau yang ada dengan berbagai adat istiadat dan kebudayaan yang mempunyai keunikan tersendiri. Dunia kepariwisataan harus mulai meninggalkan tentang perencanaan jangka pendek dan harus mampu melihat dalam prespektif jangka panjang dengan menghitung segala pengaruh yang mungkin akan timbul dan berpengaruh terhadap dunia kepariwisataan.

Komponen utama dalam aktivitas pariwisata adalah obyek dan daya tarik wisata. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, obyek dan daya tarik wisata meliputi keadaan alam, flora, fauna serta hasil karya manusia. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan mengidentifikasi dan mengelola potensi-potensi yang ada di daerahnya, untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna terselenggaranya aktifitas pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daerahnya. Dengan demikian pemerintah daerah berkewajiban secara konsisten mengelola potensi-potensi yang bisa dikembangkan, salah satunya adalah

pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara.

Sejalan dengan hal di atas, dalam ketetapan MPR No. IV. Tahun 1999 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) (1999:23) menetapkan bahwa :

“Pengembangan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisiplin dan partisipator dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, agronomis, social budaya, hemat energy, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan”

Jadi pengembangan pariwisata pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan lahir maupun batin bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga kekayaan wilayah nusantara sebagai modal dan landasan pengembangan budaya bangsa secara keseluruhan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Dari sudut sosial, kegiatan pariwisata akan memperluas kesempatan tenaga kerja baik dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana maupun dari berbagai sektor usaha yang langsung maupun yang tidak langsung berkaitan dengan kepariwisataan. Pariwisata akan dapat menimbulkan dan meningkatkan pengenalan dan cinta terhadap tanah airnya, sehingga dapat memotifasi sikap toleransi dalam pergaulan yang merupakan kekuatan dalam pembangunan bangsa, selain itu pariwisata juga mampu memperluas cakrawala pandangan pribadi terhadap nilai-nilai kehidupan.

Dari sudut ekonomi bahwa kegiatan pariwisata dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah bersumber dari pajak, retribusi parkir dan karcis atau dapat mendatangkan devisa dari para wisatawan mancanegara yang berkunjung. Adanya pariwisata juga akan menumbuhkan usaha-usaha ekonomi yang saling merangkai dan menunjang kegiatannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kepariwisataan merupakan salah satu komoditi ekspor non migas yang cukup potensial, yang mampu mendatangkan devisa yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diperlukan suatu konsentrasi penuh dari pemerintah pusat, guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah, terutama di daerah yang memiliki potensi pariwisata, sehingga dapat dikelola semaksimal mungkin. Dengan demikian, sektor kepariwisataan merupakan salah satu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah terutama dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan. Untuk merealisasikan semua itu, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bidang kepariwisataan, seperti yang tercantum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 1999 (1999:23) yang menyebutkan bahwa :

“Menjadikan kesenian dan kebudayaan nasional Indonesia sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata nasional dan mempromosikannya keluar negeri secara konsisten sehingga dapat menjadi wahana persahabatan antara bangsa.

Dengan adanya berbagai kebijakan yang mendukung dunia kepariwisataan, maka tentunya akan memberikan peluang yang sangat besar untuk

mengembangkan dunia kepariwisataan di Indonesia, khususnya bagi daerah yang memiliki sejumlah potensi wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya.

Dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut, maka dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan pemanfaatan potensi wilayah yang berbasis masyarakat, serta memberikan perlindungan kelestarian sumber hayati kepariwisataan. Sehingga tujuan pembangunan dapat menciptakan lapangan kerja produktifitas serta mempertahankan sumber daya alam dalam lingkup wilayah Kabupaten Kampar. Dan berikut ini adalah beberapa sektor Objek Pariwisata yang khusus terdapat di Kabupaten Kampar, di antaranya yaitu :

1. Objek Wisata Budaya

No	Nama Objek Wisata	Lokasi
1	Pekan Budaya Kampar	
2	Belimau Kasai	Desa Batu Belah
3	Muawuo Danau Bokuok	Kec. Tambang
4	Ziarah Kubur Hari Raya Enam	Kec. Bangkinang
5	Pacu Sampan Buluh Cina	Kec. Siak hulu
6	Pacu Tongkang	Desa Pulau Belimbing
7	Mancokou Ikan	Kec. Kampar Kiri Hulu

2. Objek Wisata Sejarah

No	Nama Objek Wisata	Lokasi
1	Candi Muara Takus	Kec. XIII Koto Kampar
2	Istana dan Makam Raja Gunung Sahilan	Kec. Gunung Sahilan
3	Musiaum Kendil Kemilau Emas	Kec. Kuok
4	Rumah Adat Lontiok	Kec. Salo

5	Rumah Adat Kenagarai Bendang	Kec. Kampar
6	Makam Datuk Panglima Khatib	Kec. Kampar
7	Makam Datuk Tabano	Kec. Bangkinang
8	Makam Rajo Darah Putih	Kec. Gunung Sahilan
9	Makam Sultan Adli Mahmud Syah	Kec. Kampar Timur
10	Makam Raja-Raja Kampar	Kec. Tambang
11	Makam Mahmud Marzuki	Kec. Bangkinang Kota

3. Objek Wisata Alam

No	Nama Objek Wisata	Lokasi
1	Kawasan Danau PLTA Koto Panjang	Kec. XIII Koto Kampar
2	Air Terjun Kebun Tinggi	Kec. Kampar Kiri hulu
3	Air Terjun Tanjung Belit	Kec. Kampar Kiri hulu
4	Air Terjun Bertingkat	Kec. Kampar Kiri hulu
5	Air Terjun Binamang	Kec. XIII Koto Kampar
6	Air Terjun Sungai Osang	Kec. XIII Koto Kampar
7	Air Terjun Kaboko	Kec. Kampar Kiri
8	Air Panas Sinama Nenek	Kec. Kuok
9	Danau Harapan Tanjung Rambutan	Kec. Kampar
10	Hutan Lindung Rimbo Terantang	Kec. Bangkinang
11	Puncak Paronama	Kec. XIII Koto Kampar
12	Danau Aquari	Kec. XIII Koto Kampar
13	Bukin Menara Prumtel PLTA	Kec. XIII Koto Kampar
14	Hutan Lindung Adat	Desa Rumbio Kec. Kampar

4. Objek Wisata Religius

No	Nama Objek Wisata	Lokasi
1	Markaz Islamy	Kab. Kampar
2	Masjid Jami' Airtiris	Kec. Kampar
3	Masjid Kubro	Kec. Kampar Timur
4	Masjid Ikhsan Pulau Tarap	Kec. Kuok
5	Makam Syech Burhanuddin	Kec. Kampar Kiri
6	Makam Syech Abdul Gani	Kec. XIII Koto Kampar
7	Makam Syech Jaafar	Kec. XIII Koto Kampar
8	Makam Syech Abdul Samad Palambani	Kec. Bangkinang Barat
9	Makam Syech Harun	Kec. Kampar
10	Makam Syech Engku Mudo Husin	Kec. Kampar Utara
11	Makam Syech Abdul Hamid	Kec. Tapung
12	Makam Syech Mahfud	Kec. Tapung
13	Makam Syech Mudo Sangkal	Kec. Kampar
14	Makam Syech Abdul Muis Al Halidy	Kec. Kampar

5. Objek Wisata Buatan

No	Nama Objek Wisata	Lokasi
1	Waduk PLTA Koto Panjang	Kec. XIII Koto Kampar
2	Bendungan Ompang Uwai	Kec. Bangkinang
3	Bendungan Sungai Paku	Kec. Kampar Kiri
4	Bendungan Simbat	Kec. Kampar Timur
5	Bendungan Sungai Tibun	Kec. Kampar Timur

6. Objek Wisata Minat Khusus

No	Nama Objek Wisata	Lokasi
1	Tugu Ekuator	Kec. Kampar Kiri
2	Desa Wisata Pulau Belimbing	Kec. Kuok
3	Desa Wisata Buluh Cina	Kec. Siak hulu

7. Objek Wisata Keluarga

No	Nama Objek Wisata	Lokasi
1	Water Park Labersa	Kec. Siak hulu
2	Bukit Naang	Kec. Bangkinang
3	Kebun Binatang Kasang Kulim	Kec. Siak hulu
4	Taman Rekreasi Stanum	Kec. Bangkinang Kota
5	Bukit Cadika	Kec. Bangkinang Kota

Sumber : Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 2013

Dari sekian banyak objek pariwisata yang terdapat di Kabupaten Kampar penulis lebih tertarik untuk mengangkat Candi Muara Takus sebagai judul penelitian. Karena Candi Muara Takus adalah satu-satunya peninggalan sejarah yang berbentuk Candi yang merupakan salah satu peninggalan Agama Buda di Provinsi Riau, tepatnya di Desa Muara Takus, Kecamatan XIII Koto Kampar. Candi Muara Takus pertama kali ditemukan pada tahun 1860 oleh seorang arkeolog bernama Cornet D. Groot. Keunikan candi ini adalah bangunannya yang terbuat dari beberapa jenis batu yaitu batu bata, batu pasir, dan juga batu sungai. Candi ini juga dikelilingi oleh bangunan semacam pagar tembok yang terbuat dari batu bata berukuran cukup besar yaitu sekitar 74x74 cm. tentunya hal ini sangat unik mengingat sebagian besar candi di Indonesia yang kita kenal menggunakan bahan utama batu andesit, seperti candi Borobudhur, Candi Prambanan, dan lain-

lain. Selain itu Candi Muara Takus juga candi tertua di Sumatra yang terbuat dari tanah liat, tanah pasir dan batu bata. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Peran Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mengembangkan Candi Muara Takus sebagai objek pariwisata, namun dalam pengembangannya candi ini terdapat beberapa masalah :

- a. Kurang terpublikasikannya Candi Muara Takus sebagai peninggalan sejarah yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar;
- b. Kurang terurusnya situs-situs peninggalan ini dengan baik, sehingga banyak dari bangunan candi yang batunya sudah mulai copot dan pecah;
- c. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti akses jalan dan perlengkapan umum lainnya;
- d. Perawatan situs sejarah yang tidak cukup dan;
- e. Dana yang diambil dari swadaya masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah sebagai perencana, pelaksanaan, dan pengontrol dalam sebuah kebijakan daerah diharapkan mampu menganalisis dan memetakan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat sehingga dalam mengeluarkan kebijakannya tidak terkesan sepihak, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan umum UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang hendak dicapai, maka pemerintah wajib melakukan pembinaan berupa pemberian pedoman, dalam hal penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan.

Untuk itu Pemerintah Pusat wajib memberikan fasilitas berupa pemberian kemudahan, bantuan dan dorongan kepada Pemerintah Daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah, sangat diharapkan daerah mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerahnya dengan melakukan identifikasi dan mengelola sumber-sumber yang berpotensi untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, karena besar kecilnya pendapat daerah sangat berefek kepada keberhasilan pelaksanaan otonomi tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan konsep otonomi dan desentralisasi yang pada hakekatnya memberikan kekuasaan, kewenangan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa sumber-sumber penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), Dana Perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah dan juga tentang hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang harus dilaksanakan secara adil

dan selaras. Maka salah satu sektor yang potensial adalah pariwisata. Namun seperti tahun-tahun sebelumnya Candi Muara Takus tidak mendapatkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang khusus untuk pembangunan dan kelestariannya, yang kiranya dapat menjadi aset bagi peningkatan pendapatan daerah, yang berujung kepada keberhasilan Pemerintah Daerah merealisasikan otonomi daerah, yang ditandai dengan terciptanya kesejahteraan yang merata didalam masyarakat.

Pengembangan sektor pariwisata merupakan suatu tindakan yang realistis dan logis, mengingat dampak positif yang ditimbulkan diantaranya semakin meluasnya kesempatan usaha, baik hotel, biro perjalanan, toko cinderamata serta meningkatnya pendapat masyarakat dan mendorong terpeliharanya keamanan dan ketertiban walaupun sebenarnya “juga” ada hal-hal yang berdampak negatif.

Beberapa kebijakan Pemerintah dalam sektor pariwisata diantaranya Pembinaan dan Pengembangan Kepariwisata seperti, mengencangkan promosi pariwisata, meyiapkan dan meningkatkan mutu pelayan dan mutu produk wisata, mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata dan produk-produk baru terutama diwilayah timur Indonesia, meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dibidang kepariwisataan dan melaksanakan kampanye nasional yang berkesinambungan (Hari Karyono ; 1997 ; 90).

Adapun kebijakan-kebijakan atau peran dalam pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar yaitu hanya membangun diluar zona inti candi sebagai contoh pembuatan kios-kios, lapangan parkir, semenisasi jalan, dermaga pancing, taman, dan mushola. Karena candi muara takus dikelola

oleh BPPP (Balai Peninggalan Purbakala dan Permusiuman) yaitu pusatnya di Batu Sangkar (Sumbar) dalam UU Nomor 05 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dengan prinsip pembangunan yang bersifat kuno (Peninggalan Sejarah)

1. Tidak boleh menghilangkan bentuk keasliannya
2. Mempertahankan filosofi-filosofi yang terkandung dari kandungan itu
3. Kalau ada bahan-bahan yang masih bagus tidak boleh dihilangkan harus dimanfaatkan.

Maka dari itu sampai sekarang Perda dari Bupati ataupun Kepala Dinas Kabupaten Kampar juga belum ada untuk menunjang kemajuan pengembangan situs objek pariwisata Candi Muara Takus tersebut. Begitu juga dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khusus juga belum ada. Padahal Potensi objek pariwisata di Kampar memang sangat banyak hanya saja belum tergarap dengan optimal maka belum bisa menghasilkan PAD yang tinggi. (Wawancara M. Saleh, Kasi Objek Wisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Kampar di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Sejalan dengan yang dijelaskan diatas, terletak di Kampar, Provinsi Riau, sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki beragam objek wisata yang kaya dan berpotensi bagi pengembangan pariwisata, namun dengan berbagai keterbatasan maka pengembangan pariwisatanya berjalan kurang baik. Selain memiliki objek

wisata bersejarah, ada terdapat objek-objek wisata lainnya dan untuk saat ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar secara bertahap berusaha mengembangkan obyek wisata di XIII Koto Kampar dengan memberikan berbagai sarana-sarana penunjang agar dapat menarik jumlah kunjungan wisata baik dari dalam maupun luar negeri.

Dari data yang penulis peroleh di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, jumlah pengunjung wisata Candi Muara Takus dari Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Table : 1.1 Jumlah Pengunjung Candi Muara Takus

No	Tahun	Jumlah pengunjung
1	2011	22.073 orang
2	2012	22.307 orang
3	2013	22.401 orang
4	2014 (Bulan Januari - April)	4665 orang
Jumlah Keseluruhan Pengunjung		71.446 orang

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dari data diatas terlihat bahwa jumlah pengunjung yang mengunjungi candi muara takus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena kawasan wisata di Kampar dianggap sangat potensial.

Namun di sisi lain kawasan pariwisata ini belum mendapat dukungan secara penuh. Menurut Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar, potensi wisata yang ada di Kabupaten Kampar memiliki daya tarik tinggi, karena menjadi obyek wisata yang diminati oleh masyarakat daerah setempat maupun masyarakat dari

daerah lain, untuk itu sangat penting untuk dilakukan studi bagi kemungkinan pengembangannya.

1.2 Rumusan Masalah

Tentang apa yang menjadi penjelasan diatas, maka akan dirumuskan beberapa permasalahan yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan yaitu:

- a. Bagaimanakah Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam mengembangkan Candi Muaratakus sebagai objek pariwisata?
- b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat yang berbasis pengembangan kepariwisataan khususnya Candi Muaratakus di Kecamatan XIII Koto Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peranan Pemerintah Daerah, dalam hal Pengembangan Candi Muaratakus sebagai objek pariwisata di Kecamatan XIII Koto Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat yang berbasis pengembangan kepariwisataan khususnya Candi Muaratakus di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar ?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

- a. Dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pengembangan obyek wisata khususnya Candi Muara Takus Kabupaten Kampar.
- b. Memberikan kontribusi pengetahuan, pemikiran, dan wawasan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan objek pariwisata khususnya Candi Muara Takus Kabupaten Kampar.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan lampiran penelitian terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, pandangan islam serta penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel.

Bab IV : Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang sejarah objek wisata yang menggambarkan sejarah singkat dan karakteristik objek penelitian, kemudian aktivitas objek penelitian atau ruang lingkup kegiatan objek penelitian, selanjutnya struktur organisasi yang menggambarkan bagan dan mekanisme kerja atau uraian tugas pada objek penelitian.

Bab V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan berupa: menganalisis hasil penelitian berdasarkan fakta dan data dengan menggunakan metode yang telah ditemukan, mengungkapkan dan menjelaskan hasil-hasil temuan sesuai dengan tujuan penelitian, membahas hasil penelitian secara mendalam dan didasari oleh argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bab VI : Penutupan

Bab ini membahas tentang penutup yang merupakan kesimpulan pembahasan ini. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan dan pembahasan berupa faktor-faktor yang mendukung dan mendorong tumbuhnya pariwisata di Kabupaten Kampar.